

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.

Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo.

Fuady, M. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. PT. Refika Aditama.

Gautama, S. (1983). *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni.

Koentjoro, D. H. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.

Lestari, A. Y. (2008). *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*. Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Liberty.

Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Raja Grafindo Persada.

Poerwadarminta, W. J. . (1982). *Kamus umum bahasa Indonesia (16th ed.)*. Balai Pustaka.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum (8th ed.)*. Citra Aditya Bakti.

Ridwan, H. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press.

Salim, H. S. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.

- Sampara, S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Total Media.
- Setiawan, R. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta.
- Shalihah, F. (2019). *ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM*
(Cetakan Pe). Kreasi Total Media.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI
Pres.
- Soemadiningrat, O. S. (2002). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontempore*.
Alumni.
- Susanti, I. (2003). *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan
Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Percikan
Gagasan tentang Hukum IV*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Thong Kie, T. (2000). *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*.
Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tobing, G. H. S. L. (1980). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*.
Erlangga.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Lekkas.
- Yulianti. (2016). *Pendidikan Etika Dan Budi Pekerti Berbasis Karakter* (1st ed.).
Ediide Infografika.

B. Sumber Lain :**1) Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

2) Jurnal Nasional

Bagus wibisono, D., & Ma'ruf, U. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Akta*, 5(1), 179.
<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2546>

Fitri, I. M., Kenotariatan, M., Hukum, F., Kuala, U. S., Aceh, P., Ismail, I.,
Hukum, F., Syiah, U., Aceh, P., Hukum, F., Syiah, U., Aceh, P., &
Daerah, M. P. (2019). *Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas
Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di
Kabupaten Aceh Timur*. 3(April), 53–62.

Purwaningsih, E. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah
Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya. *Mimbar Hukum -
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 14.
<https://doi.org/10.22146/jmh.15907>